

HAEDAR NASHIR

Kembangkan Dakwah Mencerahkan

Ribuan peserta Mukhtar Ke-47 Muhammadiyah yang memadati aula Universitas Muhammadiyah, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (6/8) malam, menyatakan setuju saat nama Haedar Nashir disebut sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2020. Bersama 12 Ketua PP Muhammadiyah lainnya, Haedar bertekad mengembangkan dakwah yang mencerahkan umat.

Berikut petikan wawancara Kompas dengan Haedar Nashir: *Bagaimana Muhammadiyah mewujudkan Indonesia berkemajuan?*

Kini, Muhammadiyah berada pada lintasan abad II. Pasca muktamar satu abad di Yogyakarta (2010), kami mencoba merekonstruksi semangat dan gerakan dunia baru yang lebih modern, tetapi masalahnya lebih kompleks dan tantangannya multiaspek. Semangatnya tetap pembaruan (*tajdid*), misinya tetap gerakan pencerahan untuk kemajuan, tetapi strateginya dipertajam.

Muhammadiyah tetap mempertahankan gerakan-gerakan yang sejak lama dilakukan, yakni pendidikan, pelayanan kesehatan, dan gerakan sosial. Namun, juga harus ada dimensi baru dalam dakwah. Pertama, dimensi pembebasan, yang dibedakan dulu dan sekarang. Misalnya, memandang kemiskinan. Meskipun dulu dianggap masalah kultural, kami anggapnya masalah struktural. Mengapa? Karena baik negara maupun nonnegara berperan memiskinkan masyarakat. Karena itu, dakwah Muhammadiyah juga diubah. Kalau dulu menyantuni anak yatim, sekarang mengadvokasi negara agar ada kebijakan mengatasi kemiskinan.

Kedua, dimensi pemberdayaan yang merupakan modal konvensional Muhammadiyah. Jika dulu simbol masyarakat kota, kelas menengah, dan borjuis, sekarang harus masuk ke pedesaan. Muhammadiyah harus menggarap segmen-segmen sosial baru, seperti petani, nelayan, dan tukang becak. Majelis Pemberdayaan Masyarakat harus membawa Muhammadiyah

jadi fenomena di pedesaan. Dimensi ketiga adalah kemajuan. Muhammadiyah perlu mereformasi semua gerakan dan amal usaha. Misalnya, jadikan sekolah dan panti asuhan sebagai pusat komunitas agar anak-anak di panti asuhan tak lagi jadi obyek, tetapi subyek.

Bagaimana Muhammadiyah turut meredam radikalisme?

Kita hidup dalam kemajemukan. Pada setiap kelompok selalu ada orang yang "keras". Pemuka agama, baik kiai, pendeta, maupun lainnya merupakan kunci mencegah radikalisme. Mereka harus mengajak orang yang radikal turut bertanggung jawab terhadap masa depan. Hal ini dilakukan secara bertahap karena orang bisa menjadi radikal karena belajar dan ada yang memang karena ideologi. Namun, mereka harus diajak berdialog.

Upaya deradikalisasi selama ini tak efektif, terutama jika menggunakan pendekatan program atau proyek dengan batas waktu. Ini seperti teori pendulum. Gerakan radikal di sisi A sebenarnya saling silang pendapat dengan pihak radikal di sisi B dengan kelompok tak radikal di tengah-tengah. Muhammadiyah pilih jalan tengah memoderasi dengan pendekatan fungsional bertahap. Ini seperti ketika Nabi Muhammad SAW melarang orang mabuk shalat. Awalnya, dibolehkan shalat dalam keadaan mabuk. Secara bertahap, akhirnya Nabi melarang umat Islam mabuk.

Muhammadiyah juga menggunakan berbagai instrumen yang dimiliki mencegah radikalisme. Selain sekolah dan layanan kesehatan, masjid juga merupakan institusi paling efektif



Sebanyak 13 Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2020 terpilih setelah disahkan dalam Muktamar Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (6/8). Haedar Nashir (nomor tujuh dari kiri) ditetapkan menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020.

Menangkal radikalisme. Masjid perlu direvitalisasi, dikembalikan fungsinya tak hanya tempat ibadah, tetapi untuk berinteraksi sosial.

Muhammadiyah punya daya tarik besar bagi partai politik, baik dari sisi anggota, aset, maupun pengaruh. Bagaimana menyikapinya?

Saya termasuk orang yang yakin, biarpun banyak ide vokal tentang politik, tetap kembali ke khittah. Kita percaya soal itu dan Muhammadiyah bisa jaga keseimbangan dengan kekuatan dakwah dan kemasyarakatan untuk tak berafiliasi dengan parpol. Mungkin pendekatannya perlu dilakukan. Jadi, kalau banyak perilaku pragmatis oportunis dan pemanfaatan lembaga-lembaga keagamaan oleh parpol dan politisi, di satu pihak memang wajar. Namun, di pihak lain, jika overdosis, tentu tak sehat lagi. Kita serbu akar masalah dan sumber pelakunya. Muhamma-



KUM

HAEDAR NASHIR

Lahir: Bandung, 14 Juli 1953

Pendidikan:

- Strata 1 (S-1) di STPMI Yogyakarta
- Strata 2 (S-2) Sosiologi
- Strata 3 (S-3) Sosiologi

Profesi:

- Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Karier di Muhammadiyah:

- 1983: Masuk menjadi anggota Muhammadiyah

diyah ke depan perlu lebih banyak berkomunikasi dengan kalangan politik dan pejabat untuk belajar membuka area baru bidang politik agar mereka tak memanfaatkan lembaga-lembaga keagamaan kelewat batas. Minimal mengajarkan keadaban. Silakan masuk lembaga keagamaan tetapi ada batasnya. Mi-

salnya, tak boleh intervensi politik uang. Ke depan, beri ruang bagi generasi untuk berpolitik cerdas adab.

Bagaimana caranya?
Muhammadiyah harus mendidik kadernya soal berkeadaban dan mencek dunia politik masih ada